

BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI SECARA HOLISTIK

Oleh:
Wagiran *

Abstract

Perkembangan dunia kerja yang tidak lagi berlangsung linier, cenderung cepat berubah dengan amat cepat menuntut pendidikan vokasi mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Oleh karenanya dalam pengembangan pendidikan vokasi, cara berpikir parsial dan linier tidak mencukupi lagi dan saatnya menuju ke arah pola berpikir holistik. Prinsip-prinsip pengembangan pendidikan kejuruan secara holistik antara lain meliputi : (1) Pendidikan vokasi sebagai Pemandu pertumbuhan ekonomi, (2) Pendidikan vokasi sebagai pelestari nilai-nilai dan norma serta agen perubahan, (3) Pendidikan vokasi Meningkatkan daya saing bangsa, (4) Pendidikan Vokasi sejak dini, (5) Pendidikan vokasi berbasis mutu, (6) Pendidikan vokasi Mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, (7) Pendidikan vokasi Tidak sebatas pendidikan dalam lingkup formal, (8) Kurikulum Pendidikan vokasi yang dinamis, adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial dan IPTEKS, (9) Kolaborasi terpadu dan saling menguntungkan antara siswa (lulusan), dunia usaha/dunia industri (Du/Di), pemerintah, dan masyarakat

Keyword: pendidikan vokasi, holistik, pengembangan pendidikan

*Dosen : Universitas Negeri Yogyakarta

A. Pendahuluan

Kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu masalah besar bagi negara berkembang di dunia termasuk Indonesia. Berbagai survey dan analisis menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, bahkan studi yang pernah dilakukan Bank Dunia dengan asumsi batas kemiskinan berupa penghasilan minimal per hari dua Dolar Amerika menunjukkan masih terdapat 49,9 % penduduk tergolong miskin dan potensial untuk miskin. Peningkatan harga minyak dunia yang berimplikasi dikurangnya subsidi harga Bahan Bakar Minyak diyakini berpotensi menambah lagi angka kemiskinan. Penyebab masih tingginya angka kemiskinan dalam analisis Bank Dunia (*Progress Report The Country Assistance Strategy 2004-2008*) antara lain adalah: iklim investasi yang lemah dan rendahnya kualitas layanan yang disampaikan kepada rakyat miskin. Selain hal tersebut

ketergantungan pada produk impor juga makin meningkatkan beban ekonomi masyarakat. Siregar (Republika Online, **23 Mei 2008**) menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia diperparah dengan ketergantungan bangsa Indonesia terhadap produk impor. Konsumsi impor Indonesia pada tahun 2000 mencapai 33,5 persen, tahun 2004 mencapai 46,5 persen, tahun 2006 meningkat menjadi 61 persen, dan tahun 2007 meningkat menjadi 74,5 persen

Disadari bahwa pengangguran berpotensi meningkatkan angka kemiskinan yang merupakan ancaman bagi suatu bangsa mengingat kemiskinan akan dekat dengan kebodohan, serta kebodohan akan lekat dengan keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan ancaman yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup suatu bangsa apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh.

Selain menghadapi masalah dalam negeri, sebagai suatu bangsa, Indonesia harus siap untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam konteks era global. Perkembangan dunia yang makin global akan menimbulkan situasi yang paradoks. Di satu sisi peluang terbuka sangat lebar namun di sisi lain persaingan makin tajam. Ibarat pisau bermata dua, keduanya sama-sama tajam. Artinya hanya bangsa yang mempunyai keunggulan kompetitif saja yang akan berjaya dan berperan dalam era mendatang. Sedangkan bangsa yang tidak mampu bersaing tidak ada pilihan lain selain tersingkir dan menjadi penonton, bahkan korban dari era tersebut. Dalam konteks daya saing tersebut terkandung pula kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensi dirinya dalam percaturan global. Oleh karenanya dalam konteks global suatu bangsa dituntut mempunyai daya saing sekaligus daya tahan untuk berkiprah dan berjaya.

Penelitian yang dilakukan Bank Dunia (2005) menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara dalam era global ditentukan oleh faktor-faktor: (1) inovasi dan kreatifitas (45 %), jaringan kerjasama/networking (25 %), teknologi/technology (20%), dan sumberdaya alam/natural resources (10 %). Fenomena global dalam milenium ke tiga ditandai pula dengan munculnya berbagai wacana dan kesadaran dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti: (1) ketergantungan pada iptek, (2) perdagangan bebas, (3) fenomena kekuatan global, (4) demokratisasi, (5) Hak Asasi Manusia, (6) lingkungan hidup, (7) kesetaraan gender, dan (8) multikulturalisme

Dalam upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya saing suatu bangsa, pendidikan menempati posisi strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini telah menjadi kesadaran umum berbagai bangsa di Dunia. *APEC Human Resource Development Working Group (11 th Education Forum Network Meeting*

merumuskan bahwa: Pendidikan yang berkualitas tinggi memiliki dampak positif pada tingkat pertumbuhan dan distribusi dari pendapatan di kawasan dan pada kualitas hidup dari kawasan tersebut. Deklarasi Kerangka Pembangunan Sumberdaya Manusia untuk Kerjasama Asia Pasific di Jakarta bulan November 1994 secara tegas menyepakati bahwa: Pembangunan sumber daya manusia memberikan kontribusi bagi pencapaian nilai fundamental sebagai usaha pengentasan kemiskinan, pemenuhan lapangan kerja, akses universal ke pendidikan primer, skunder, dan kejuruan, dan partisipasi penuh dari seluruh kelompok dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dari berbagai pendapat tersebut jelas bahwa pendidikan sebagai pranata utama penyiapan SDM dalam era global memiliki peran strategis menyiapkan SDM yang berdaya saing.

Pendidikan kejuruan sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusannya memasuki dunia kerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM khususnya tenaga kerja tingkat menengah.

Technical and Voc Education, has crucial role to play as an effective to realize the objectives of culture of peace..... TVET play an instrument role in developing well trained technical workforce which is essential for any country's efforts to achieve sustainable development ...as an effective tool to realize the objectives of a culture of peace...social cohesion and international citizenship; not only prepare individual as an employment but also make them responsible citizens who has integrity to their environment and others (Final report, 2th International Conference on TVE)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu jenis satuan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah (UU No. 20/2003). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terbukti bahwa SMK memiliki peran strategis dalam pendidikan ketenagakerjaan. Posisi

strategis tersebut tampak dalam berbagai aspek berikut:

1. SMK merupakan bagian integral dari sektor ekonomi yang turut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karenanya SMK perlu dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Kualitas SMK merefleksikan kualitas tenaga kerja Indonesia yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia Indonesia.
3. SMK berperan dalam mengurangi indeks pengangguran dalam lingkup lokal maupun nasional.

Pengalaman di lapangan maupun data proyeksi perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa ditinjau dari prospek kebutuhan maupun kelayakan ekonomisnya pendidikan kejuruan masih merupakan investasi yang cukup baik dalam mempersiapkan tenaga terampil tingkat menengah (Sukanto, 1998). Hasil analisis biaya-manfaat yang dilakukan Abbas Ghazali (2000, 2004) menunjukkan bahwa secara keseluruhan investasi di sekolah lanjutan tingkat atas baik SMU maupun SMK adalah menguntungkan. Selain itu ditemukan bahwa investasi di SMK terutama SMK Teknologi adalah investasi yang paling menguntungkan. Analisis yang dilakukan Widarto, dkk (2007) menunjukkan bahwa terdapat peran positif SMK kelompok Teknologi terhadap pertumbuhan industri manufaktur secara nasional.

Salahsatu kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional adalah reproporsionalisasi SMU-SMK. Hal ini tampak tegas dalam salah satu isi sambutan Menteri Pendidikan Nasional dalam Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2007 sebagai berikut:

“Selain itu, dalam upaya mendorong keluaran pendidikan kita dan lebih relevan dengan tuntutan kebutuhan angkatan kerja, pemerintah telah berupaya untuk

mengubah komposisi rasio jumlah sekolah umum dan kejuruan dari 30:70 menjadi 70:30 sampai tahun 2015, dan rasio pada akhir tahun 2006 telah mencapai 35:65 “.

Dalam lingkup operasional, komitmen pelaksanaan kebijakan tersebut dapat kita lihat dari Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK yang menargetkan pada tahun 2010 proporsi antara SMA dan SMK telah mencapai 50: 50. Berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan memfasilitasi pendirian SMK-SMK baru, pendirian SMK Kecil, maupun diversifikasi jurusan dan program studi yang ada di SMK.

B. Permasalahan Pendidikan Kejuruan

Meskipun menunjukkan peran positif, beberapa studi masih menunjukkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan. Permasalahan tersebut terkait dengan kontribusi bagi masyarakat, kualitas penyelenggaraan program, pembelajaran, kesempatan lulusan mendapatkan pekerjaan, dan tantangan perubahan yang begitu cepat. Governing Board Members (2004) mencatat beberapa isu dan trend pendidikan kejuruan di kawasan Asia Tenggara yang antara lain menunjukkan: (1) *Limited number of qualified personnel with high quality including commitment and result-focused*, (2) *Limited capacity in utilization of research and evaluation as tools for development*, (3) *Unsystematic or lack of staff development programs*, (4) *Negative image of VTE especially among community members*, (5) *Inadequate number of qualified teachers*, (6) *Lack of public-private sector partnership in training teachers and students*, (7) *Curriculum irrelevancy and the misfit of VTET graduates*, (8) *Coping with IT explosion and rapid expansion of ICT*, (9) *Lacking in the development of teaching and learning resources*, dan (10) *Lack of facilities, especially lab and workshops*

Chancai Siriawat (2005), Wakil Presiden Penelitian dan Pelatihan Institut Teknologi Rajamangala Thailand dalam pidatonya pada forum APEC dengan topik Internasionalisasi Pendidikan kejuruan

menyatakan bahwa negara-negara anggota menghadapi masalah-masalah berikut ini :

1. Hubungan antara industri dan perdagangan, pemerintah dan penyedia pendidikan dan pelatihan tidak di bangun dengan baik dan kebanyakan bersifat informal.
2. Guru teknik dan kejuruan kekurangan pengalaman didunia kerja dan oleh karenanya kepercayaan diri dan kredibilitas diperlukan untuk membangun hubungan formal dan erat dengan indutri dan perdagangan.
3. Karena guru-guru kekurangan pengalaman praktis, kurikulum bisaanya bersifat teoritis dan siswa yang telah lulus tidak dapat membuat koneksi antara teori dan aplikasi praktis yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka.
4. Pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan formal di batasi untuk sistem pendidikan sekunder ke atas.
5. Sistem pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan formal tidak mampu menaikkan program intensif untuk meningkatkan pekerja-pekerja yang telah ada.
6. Program pelatihan guru belum dilengkapi dengan pengajaran dan kebutuhan pendidikan umum dan tidak dilengkapi dengan guru-guru yang memiliki kecakapan teknik.
7. Kebanyakan kurikulum teknik dan kejuruan dan materi pembelajaran tidak fleksibel dan usang dan sumber-sumber untuk memperbaiki situasi ini langka.
8. Perlengkapan di kebanyakan sekolah dan perguruan teknik dan kejuruan usang dan tidak terawat dengan baik.
9. Ada inkonsistensi luas dalam penggunaan nomenklatur untuk penghargaan akademik, dan industri percaya bahwa kualitas lulusan sangat bervariasi.
10. Ada sedikit ketentuan formal untuk artikulasi antara penghargaan teknik dan kejuruan dan universitas.

Dalam lingkup nasional, permasalahan pendidikan kejuruan terutama menyangkut relevansi dan kolaborasi

antara sekolah dengan dunia usaha/industri. Hasil observasi empirik di lapangan masih mengindikasikan bahwa sebagian besar lulusan SMK kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sulit untuk bisa dilatih kembali, dan kurang bisa mengembangkan diri. Hasil kajian yang dilakukan Widarto, dkk (2007) menunjukkan bahwa salahsatu kelemahan utama lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja adalah aspek *soft skills* seperti percaya diri, kemampuan adaptasi, komunikasi, disiplin, etos kerja, hingga kemampuan kerjasama. Hal ini selaras dengan rumusan Zoolingen (2004) mengemukakan kualifikasi yang dibutuhkan bagi lulusan pendidikan kejuruan ke depan yang meliputi: *flexible broadly-skilled employee, can work in a less structured enviroentment, able to respond, rapidly and effectively, life long learning to the change that occuring in their work and organization, able to work independently, to solve complex problem, exercise initiative, make decision quickly, able to plan their work.*

Dengan berbagai tantangan tersebut peserta didik perlu dipersiapkan secara serius dalam berbagai program kejuruan dengan mempertajam kemampuan adaptif, sejalan dengan kebutuhan kompetensi baik yang bersifat personal maupun sosial. Kompetensi personal meliputi kreativitas, ketekunan, kemampuan memikul tanggungjawab, memiliki kemampuan kejuruan dan sikap profesional, serta memiliki kecerdasan emosional. Kompetensi sosial adalah kemampuan bekerja secara efisien di dalam kelompok. Sedangkan kompetensi kerja merupakan karakteristik dasar yang dimiliki seseorang yang mengindikasikan cara berpikir dan bertindak untuk berbagai situasi dan dalam jangka waktu yang lama (Spencer and Spencer, 1993).

C. Sembilan Prinsip Pengembangan Pendidikan Vokasi secara Holistik

Pada dasarnya awal munculnya pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan untuk menyiapkan lulusannya siap memasuki dunia kerja. Oleh

karenanya kondisi dan situasi dunia kerja merupakan faktor pendorong dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Perkembangan dunia kerja yang tidak lagi berlangsung linier, cenderung cepat berubah dengan amat cepat menuntut pendidikan vokasi mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Oleh karenanya dalam pengembangan pendidikan vokasi, cara berpikir parsial dan linier tidak mencukupi lagi dan saatnya menuju ke arah pola berpikir holistik. Berdasarkan kerangka tersebut dalam analisis penulis, pemikiran-pemikiran pengembangan pendidikan kejuruan secara holistik menempatkan pendidikan vokasi dalam posisi sebagai berikut (lihat Gambar 1) :

Berdasarkan kerangka pikir sebagaimana terlihat dalam Gambar 1. secara rinci prinsip-prinsip pengembangan pendidikan kejuruan secara holistik antara lain meliputi :

1. Pendidikan vokasi sebagai Pemandu pertumbuhan ekonomi.

Paradigma yang menyatakan bahwa pendidikan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja sebagai akibat pertumbuhan ekonomi seyogyanya diubah menjadi pendidikan semestinya mampu menjadi pemandu pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini berarti bahwa pendidikanlah yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Pendidikan semestinya menjadi institusi pusat pembaharuan baik pada tingkat mikro maupun pada tingkat makro. Pada tingkat mikro pendidikan harus mampu menciptakan iklim berkembangnya kreativitas dan kemandirian sedangkan pada pada tingkat mikro menuntut sistem manajemen yang unggul.

2. Pendidikan vokasi sebagai pelestari nilai-nilai dan norma serta agen perubahan.

Pendidikan memiliki peran sebagai pelestari nilai-nilai dan norma di masyarakat sekaligus sebagai agen perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini

berarti bahwa pengembangan pendidikan vokasi menyanggah dua tugas tersebut. Pendidikan vokasi tidak semata-mata menjadi agen perubahan namun juga perlu berperan dalam melestarikan nilai-nilai dan norma-norma yang layak dilstarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya . Pelestarian nilai-nilai dan norma tersebut terkait erat dengan upaya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi namun juga memiliki sikap dan moralitas yang unggul.

3. Pendidikan vokasi Meningkatkan daya saing bangsa

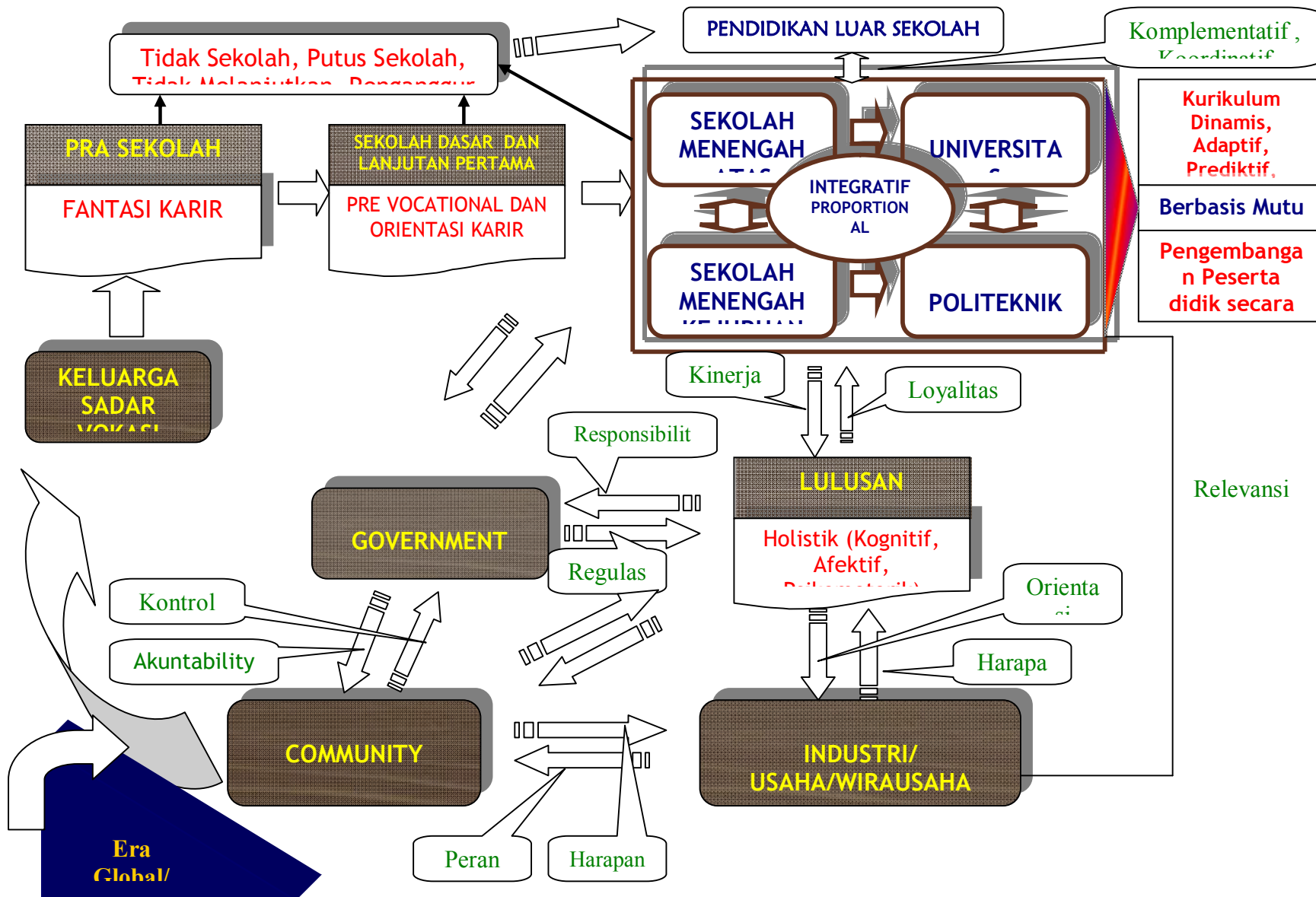
Pengembangan pendidikan vokasi haruslah diarahkan pada upaya meningkatkan daya saing suatu bangsa dalam menghadapi kehidupan di era global. Dengan persaingan yang begitu terbuka di era global, maka kekuatan utama suatu bangsa akan ditentukan oleh kemampuan manajemen, teknologi dan sumberdaya manusia. Asset paling penting dalam era ini adalah *human capital* atau *intellectual capital*. Dengan demikian pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mengembangkan SDM dan teknologi sebagai penentu daya saing bangsa. Persaingan dalam hal ini hendaklah tidak dianggap sebagai suatu yang merugikan, namun sebagai suatu hal yang sangat berguna dalam memacu peningkatan kapasitas, produktivitas dan kemampuan teknologi.

SEMINAR INTERNASIONAL

Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dalam Pengembangan SDM Nasional



PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASIONAL DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK



4. Pendidikan Vokasi sejak dini

Pada dasarnya setiap orang memerlukan pekerjaan sebagai langkah untuk mempertahankan serta memenuhi kebutuhan hidup dan aktualisasi diri. Karir seseorang tidaklah didapatkan secara tiba-tiba dengan waktu yang singkat, namun diperoleh dengan rangkaian proses sehingga menjadi pilihan yang mantap. Oleh karenanya seseorang perlu disiapkan dan menyiapkan diri sejak dini agar nantinya memperoleh pilihan karir yang betul-betul diinginkannya. Tingkat pengangguran yang begitu tinggi di negara ini salahsatu sebabnya dapat diduga secara pasti diakibatkan oleh keterlambatan mereka dalam menentukan karir atau bahkan mereka tidak mempunyai rencana karir. Hal ini menjadi penting mengingat perubahan yang begitucepat dalam dunia ketenagakerjaan.

Apabila kita cermati dari tahap perkembangan vokasional manusia mulai dari tahap pertumbuhan (4 – 14 th), tahap eksplorasi karir (15 – 24 th), tahap pematapan karir (25 – 30 th), tahap pelestarian (45 – 64 th) dan tahap penyurutan (65 th ke atas), dapat disimpulkan bahwa pendidikan vokasi sebetulnya diperlukan sepanjang hayat mulai usia dini hingga usia lanjut. Secara dini dalam lingkup keluarga, pengembangan pendidikan vokasi dapat dilakukan dengan upaya orangtua mengenalkan anak pada berbagai macam profesi (fantasi). Dalam lingkup persekolahan mulai tingkat Sekolah Dasar sekolah lanjutan pertama, sekolah menengah dan perguruan tinggi perlu dikembangkan pendidikan vokasi dengan berbagai variasinya. Misalnya tahap pengembangan kecerdasan motorik (di SD), orientasi karir (SMP), eksplorasi dan pematapan karir (Sekolah menengah) untuk kemudian hidup di masyarakat.

5. Pendidikan vokasi berbasis mutu

Penyelenggaraan pendidikan berbasis mutu mutlak diperlukan apabila pendidikan vokasi ingin menghasilkan kualitas input, proses, output maupun *outcome* yang dapat dipertanggungjawabkan. Dimensi mutu dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi meliputi: fokus pada konsumen, keterlibatan total, pengukuran, komitmen dan perbaikan berkelanjutan. Dengan memadukan kelima aspek tersebut diharapkan tercipta pendidikan vokasi yang bermutu.

6. Pendidikan vokasi Mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh.

Tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak lagi berjalan secara linier membutuhkan seseorang yang tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan teknis dalam suatu bidang, namun diperlukan pengembangan aspek lain secara terpadu seperti daya adaptasi, etika, moral, kemampuan *Information technology*, komputer dan sebagainya. Oleh karena itu sudah saatnya pembelajaran lebih diarahkan pada upaya pengembangan potensi siswa secara menyeluruh dari aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Konsep-konsep *multiple inteligent, life skills, broad based education* perlu diterapkan sesuai konteks masing-masing. Perubahan yang begitu cepat dalam berbagai aspek kehidupan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan seseorang yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam bekerja saja namun juga memiliki daya suai terhadap berbagai perubahan, kemandirian dan kemampuan untuk berkembang.

Menghadapi permasalahan dan tantangan pendidikan tersebut perlu dilakukan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional yang dipandang berbagai pihak tidak efektif dan tidak mampu lagi memberikan bekal serta tidak

dapat mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan negara-negara lain. Perubahan tersebut menuju suatu sistem pendidikan yang membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, kompetensi dan kemampuan mengembangkan diri sesuai dengan lingkungan dan tuntutan hidupnya. Pendidikan sudah saatnya diletakkan pada empat pilar belajar yaitu: belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*) dan belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*). Selain itu perlu dikembangkan kemampuan adaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan kehidupan.

Peserta didik harus dibekali dengan kemandirian menghadapi lingkungan yang mudah berubah. Kalau peserta didik hanya dibekali dengan bekal ketrampilan kerja maka ia akan kecewa manakala struktur pekerjaan telah berubah dengan cepat dan apa yang ia dapatkan di sekolah ternyata telah usang. Akan lebih baik kalau ia dibekali dengan kemampuan memahami perubahan itu sendiri untuk dapat menyesuaikan diri dan bahkan menciptakan lapangan kerja.

Pendidikan adalah proses *hominisasi* dan *humanisasi* yaitu proses memanusiakan manusia muda menjadi pribadi yang utuh. Manusia yang utuh atau sempurna adalah apabila dapat mengembangkan unsur rasionalitas, kesadaran, akal budinya (pengetahuan), mengembangkan segi spiritualitas, moralitas, sosialitas, keselarasan dengan alam, serta rasa dan emosinya. Bila manusia yang kita inginkan adalah manusia yang utuh dalam semua segi kemanusiaannya maka jelas bahwa pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik/manusia muda menjadi manusia seutuhnya haruslah menyangkut semua unsur kehidupan manusia seperti spiritualitas, moralitas, sosialitas, rasa, rasionalitas. Oleh

karena itu pendidikan bukan hanya menekankan segi pengetahuan saja namun harus memperhatikan sisi yang lain secara integratif.

7. Pendidikan vokasi Tidak sebatas pendidikan dalam lingkup formal

Pendidikan vokasional lebih dari sekedar pendidikan formal. Hal ini mengingat masih banyaknya penduduk yang kurang beruntung yaitu yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal, angka putus sekolah, dan lulusan yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Dalam lingkup Sekolah Menengah Atas misalnya, angka melanjutkan lulusan ke Perguruan Tinggi relatif rendah, dengan demikian mereka memasuki lapangan kerja tanpa bekal yang memadai. Orang-orang yang putus sekolah, tidak melanjutkan dan penganggur yang jumlahnya cukup besar perlu mendapat perhatian yang memadai. Lembaga-lembaga kursus maupun pelatihan-pelatihan dapat berperan secara sinergis dalam memberikan bekal kepada mereka untuk siap memasuki dunia kerja.

8. Kurikulum Pendidikan vokasi yang dinamis, adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial dan IPTEKS

Merencanakan kurikulum merupakan upaya untuk menghasilkan lulusan yang siap hidup di masa mendatang. Oleh karenanya desain kurikulum haruslah peka dengan kondisi ke depan. Dalam menyusun kurikulum diperlukan pemikiran holistik dan bukan parsial

Beberapa karakteristik minimal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum antara lain:

- Berorientasi pada Kebutuhan SDM Era Global
- Berorientasi pada Filosofi Pengembangan Pendidikan
- Berorientasi pada Tujuan dan Kondisi Pendidikan Nasional
- Berorientasi pada Perkembangan Iptek

- ❑ Berorientasi pada Kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat
- ❑ Berorientasi pada Karakteristik Daerah Setempat
- ❑ Berorientasi pada Karakteristik Peserta Didik
- ❑ Orientasi Hasil Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

9. Kolaborasi terpadu dan saling menguntungkan antara siswa (lulusan), dunia usaha/dunia industri (Du/Di), pemerintah, dan masyarakat

Kolaborasi sinergis antar elemen yang terkait merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan pendidikan vokasi yang lebih bermakna. Kolaborasi yang dimaksudkan adalah kolaborasi model *win-win solution*, sehingga setiap pihak merasa diuntungkan. Oleh karenanya perlu dibangun kesepahaman, keyakinan dan kesediaan masing-masing elemen terkait dalam pelaksanaan pendidikan vokasi. Melalui kerjasama sinergis tersebut dapat pula dirancang metode pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual.

Melalui sembilan prinsip tersebut diharapkan tercipta pendidikan vokasi yang unggul dan mampu menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk mencapai kejayaan bangsa di era mendatang

D. Kesimpulan

Awal munculnya pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan untuk menyiapkan lulusannya siap memasuki dunia kerja. Oleh karenanya kondisi dan situasi dunia kerja merupakan faktor pendorong dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Perkembangan dunia kerja yang tidak lagi berlangsung linier, cenderung cepat berubah dengan amat cepat menuntut pendidikan vokasi mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Oleh karenanya dalam

pengembangan pendidikan vokasi, cara berpikir parsial dan linier tidak mencukupi lagi dan saatnya menuju ke arah pola berpikir holistik. Prinsip-prinsip pengembangan pendidikan kejuruan secara holistik antara lain meliputi : (1) Pendidikan vokasi sebagai Pemandu pertumbuhan ekonomi, (2) Pendidikan vokasi sebagai pelestari nilai-nilai dan norma serta agen perubahan, (3) Pendidikan vokasi Meningkatkan daya saing bangsa, (4) Pendidikan Vokasi sejak dini, (5) Pendidikan vokasi berbasis mutu, (6) Pendidikan vokasi Mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, (7) Pendidikan vokasi Tidak sebatas pendidikan dalam lingkup formal, (8) Kurikulum Pendidikan vokasi yang dinamis, adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial dan IPTEKS, (9) Kolaborasi terpadu dan saling menguntungkan antara siswa (lulusan), dunia usaha/dunia industri (Du/Di), pemerintah, dan masyarakat

REFERENCE

Abbas Ghozali, (2000). Analisis biaya-manfaat SMU dan SMK. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 022. Tahun ke-5. Hal. 57 – 85.

Abbas Ghozali, (2004). *Studi Peranan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. (Balitbang Departemen Pendidikan Nasional

Chancai Siriwat (2005) *Vocational Educational and Research in Thailand. APEC Toward 2020*. ANTA

Sambutan Menteri Pendidikan Nasional dalam Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2007

Sukamto, (1998). Orientasi dunia kerja dalam proses dan status akreditasi SMK. *Jurnal Kependidikan Edisi Khusus Dies Tahun XXXVIII*. Hal. 109 –126.

Widarto, Losina Purnastuti, Sukir, Wagiran (2007) Peranan SMK Kelompok Teknologi terhadap Pertumbuhan Manufaktur. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Zolingen, S.J.. *The Role of Key Qualifications in Transition from Vocational to Work*

_____ *APEC Human Resource Development Working Group (11 th Education Forum Network Meeting Denpasar 19 s.d. 22 Januari 1998*

_____ “74,5 Persen Rakyat Indonesia Pakai Produk Impor “
Republika Online, 23 Mei 2008)

_____ *Final report, 2th International Conference on TVE*

Undang-undang Nomor. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

_____ Governing Board Members. Issues and Trends for VTET in South East Asia.

_____ *Progress Report The Country Assistance Strategy 2004-2008*